Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi

Aqiel Khalisun Nada Imron, Program Studi Akuntansi, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng
Dwi Ari Pertiwi, Program Studi Akuntansi, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng

Abstract:

Fixed Assets are assets that require careful policies and management in their reporting. The company's overall financial reporting, both in terms of the condition and description of the company, must be in accordance with the policies that have been determined. The author uses Primary Data in the form of an inventory card and makes direct observations of the regional asset and goods management department by participating in asset input activities. The author also aims to determine the treatment of fixed assets and to determine the suitability of accounting for fixed assets according to SAP No.07 at the Ngawi Regency Finance Agency

Keywords: *Accounting Treatment, Fixed Assets, Financial Entities.*

Abstrak:

Aset Tetap merupakan aset yang memerlukan kebijakan serta pengelolaan yang cermat dalam pelaporannya. Pelaporan keuangan perusahaan secara keseluruhan, baik kondisi serta gambaran perusahaan harus sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Penulis menggunakan data Primer berupa kartu inventaris barang serta melakukan praktek ke lapangan secara langsung kepada bagian pengelolaan aset dan barang daerah dengan mengikuti kegiatan penginputan aset. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui perlakuan aset tetap dan untuk mengetahui kesesuaian akuntansi aset tetap menurut SAP No.07 pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi.

Kata kunci: Perlakuan Akuntansi, Aset Tetap, Badan Keuangan.

Email : aqielnada88@gmail.com

PENDAHULUAN

Pemerintah di bawah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) memerlukan kontrol atas penggunaan aset yang didapat. Tugas instansi pemerintah adalah melayani masyarakat, dengan adanya aset tetap yang dapat ditingkatkan kualitasnya untuk menunjang pencapaian tugas dan fungsi instansi pemerintah (Manossoh & Lambey, 2019). Pembatasan perlakuan pembukuan atas sumber daya tetap bergantung pada prinsip-prinsip Pembukuan otoritas publik yang digunakan. Otoritas publik telah mengubah Prinsip Pembukuan otoritas publik sebagai pekerjaan untuk bekerja pada perincian moneter dan tanggung jawab kepada orang-orang pada umumnya, termasuk mengembangkan lebih lanjut pengumuman sumber daya tetap pemerintah. Adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, tentang Pokok-pokok Pembukuan Pemerintah Berbasis Pengumpulan merupakan perubahan dari Norma Pembukuan Pemerintah dari yang sudah berbasis tunai menjadi berbasis akumulasi, yang memiliki konsekuensi signifikan untuk perlakuan aset di mana kemerosotan dipertimbangkan dalam penilaian dari aset tetap.

Penanganan Aset Tetap menurut Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 Tentang Harta Tetap, merupakan suatu peraturan yang mengatur mengenai harta tetap yang dapat menggunakan sistem pembukuan berpasangan untuk menyatukan arus uang dan barang (Safitri, 2017). Standar Akuntansi Nasional No. 07 berlaku untuk semua entitas pemerintah yang menyampaikan laporan keuangan untuk mengatur tentang perlakuan akuntansi

baik itu pengakuan, pengukuran, penilaian awal, penyusutan, penilaian kembali, serta penyajian, dan pengungkapan yang digunakan apakah perlakuan aset tetap telah sesuai dengan standar yang ditentukan pemerintah Indonesia.

Jenis-jenis aset tetap menurut (BPK.RI, 2010) tentang PSAP No 7 paragraf 4 terdiri dari:

Tanah, tanah dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang didapatkan dengan tujuan untuk dipakai sebagai kegiatan operasional pemerintah, serta dalam kondisi siap untuk dipakai.

Peralatan dan Mesin, meliputi mesin dan kendaraan, peralatan elektronik, semua perlengkapan di kantor, dan peralatan-peralatan lainnya yang memiliki masa manfaat 12 bulan (1 tahun) atau lebih dalam keadaan berharga dan siap untuk pakai.

Gedung, dan Bangunan, termasuk semua bangunan dan struktur yang diperoleh untuk dipergunakan dalam kegiatan yang dioperasikan pemerintah dan kesiapan untuk digunakan.

Jalan, Irigasi, serta Jaringan, yang diklaim oleh negara dan dimiliki oleh negara serta diawasi dalam keadaan siap pakai

Aset Tetap Lainnya, yang mencakup sumber daya tetap yang tidak dapat digabungkan dengan sumber daya tetap di atas, sumber daya tetap lainnya diperoleh dan digunakan untuk latihan fungsional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Kontruksi dalam Pengerjaan, mencakup aset tetap yang sedang dalam pembangunan, namun pada tanggal pengungkapan moneter itu belum sepenuhnya selesai.

Unsur-unsur dari PSAP No. 7 berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010:

Pengakuan, sumber daya tetap dirasakan ketika potensi keuntungan finansial di masa depan dapat diperoleh oleh otoritas publik dan memiliki nilai yang dapat diperkirakan dengan andal (Rosmawati & Ishak, 2017).

Pengukuran, ketika penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya pengamanan tidak diperbolehkan, nilai aset tetap tergantung pada nilai wajar di saat perolehan.

Penilaian Awal Aset Tetap, Sesuai PSAP No. 07 paragraf 25, properti, dan peralatan dapat diperoleh oleh otoritas publik sebagai hadiah ataupun donasi, properti yang dibeli harus dihargai dengan nilai yang wajar di saat properti tersebut diperoleh..

Penyusutan Aset Tetap, Seperti yang ditunjukkan pada PSAP No. 07 paragraf 53, penurunan nilai adalah penetapan nilai aset yang dapat disusutkan atas keberadaan berharga dari aset yang bersangkutan

Penilaian kembali Aset Tetap, Sesuai PSAP No. 07 paragraf 60, Untuk situasi ini laporan anggaran harus mengklarifikasi penyimpangan dari gagasan pengeluaran pada saat penyajian aset tetap tersebut serta dampak penyimpangan. Perbedaan antar nilai revaluasi dan ukuran penyampaian aset tetap tersebut dicatat dalam entitas.

Penyajian serta Pengungkapan Aset Tetap, Menurut (BPK.RI, 2017) Pada Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2017, aset tetap diutarakan sebesar perolehan biaya dan telah dikurangi nilai akumulasi penyusutan. Jika kondisi memungkinkan revaluasi, aktiva tetap direkonsiliasi dalam akun aset serta akun ekuitas masing-masing. Menurut PSAP nomor 07 paragraf 80, Jurnal keuangan juga mengungkapkan: (a) kepemilikan dan keberadaan dan pembatasan aset berwujud (b) kebijakan akuntansi untuk pendanaan aset berwujud

(c) biaya umum konstruksi, aset berwujud dan peralatan dalam penyelesaian (d) jumlah yang disepakati untuk memperoleh atau mendapatkan aset berwujud.

METODE KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan PKL dilaksanakan pada tanggal 1 Juli s/d 31 Juli 2021 pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi yang berlokasi di Jl. Teuku Umar No.12 Ngawi. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara langsung selama 3 hari dan juga *work from home (WFH)* selama 27 hari, penulis dalam meneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Penulis juga menggunakan data primer berupa kartu inventaris barang, data sekunder yang digunakan adalah literatur, baik berupa buku serta jurnal yang diakses melalui internet. Data tersebut digunakan untuk memperkuat hasil yang didapatkan dari data primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntansi Aset Tetap Badan Keuangan Kab. Ngawi Tahun 2020 terdiri dari 7 komponen. Berikut adalah daftar jenis aset tetap lembaga keuangan Kab. Ngawi Tahun 2020:

Tabel 1 Daftar Jenis Aset Tetap Badan Keuangan Kab. Ngawi Tahun 2020

No	Nama Bidang Barang	Aset Tetap Per 31 Desember 2020
1	Tanah	Rp. 2.634.000
2	Peralatan, serta Mesin	Rp. 7.638.157.150
3	Gedung, serta Bangunan	Rp. 266.010.000
4	Jalan, Irigasi, serta Jaringan	Rp. 0
5	Aaset Tetap Lainnya	Rp. 48.470.900
6	Akumulasi Penyusutan	(Rp6.761.978.679)
7	Total Aset Tetap	Rp. 1.193.293.371

Hasil dari perbandingan Perllakuan Aset Tetap pada Badan Keuangan Kab. Ngawi sudah sesuai dan benar dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (SAP), dimana dalam Peraturan Bupati No17 Tahun 2017 harus memenuhi kriteria tersebut berwujud dan memiliki masa manfaat setidaknya 12 bulan (12 bulan). Aset tetap dapat dihitung dengan andal, tidak tersedia untuk dibeli dalam kegiatan bisnis normal, dan diperoleh atau dikembangkan untuk penggunaan yang diharapkan.

Tabel 2 Perbandingan Pengakuan Aset Tetap Pada Badan Keuangan Kab. Ngawi dengan PSAP

No. 07

PP Nomor 71 Tahun 2010 (SAP)	Badan Keuangan Kabupaten Ngawi	Keterangan
Mempunyai jangka waktu penggunaan lebih dari 12 bulan (1 Tahun)	Aset tanah dapat diakui apabila mempunyai jangka waktu penggunaan lebih dari 1 tahun Peralatan serta mesin dapat diakui apabila mempunyai jangka waktu penggunaan lebih dari 1 tahun Suatu gedung beserta bangunan dapat diakui apabila mempunyai jangka waktu penggunaan lebih dari 1 tahun Aset jalan, irigasi, serta jaringan dapat diakui apabila mempunyai jangka waktu penggunaan lebih dari 1 tahun Aset tetap lainnya dapat diakui apabila mempunyai jangka waktu penggunaan lebih dari 1 tahun	Sesuai
Biaya perolehan aset dapat dihitung dengan andal	Dapat mengukur nilai aset tanah dengan andal. Dapat mengukur nilai aset peralatan serta mesin dengan andal Dapat mengukur nilai aset gedung beserta bangunan dengan andal Dapat mengukur nilai aset jalan, irigasi, serta jaringan dengan andal Dapat mengukur nilai aset tetap lainnya dengan andal	Sesuai
Tidak diharapkan untuk dijual dalam aktivitas serta diperoleh atau dibangun untuk digunakan	Pengadaan aset tanah pemerintah diperoleh untuk dapat dipergunakan Aset peralatan serta mesin didapatkan yang akan diberikan kepada pihak lainnya untuk dapat dipergunakan. Aset gedung serta bangunan yang dibangun pemerintah namun dengan maksud diberikan kepada pihak lainnya untuk dapat dipergunakan. Aset jalan, irigasi serta jaringan di bangun pemerintah diperoleh untuk dapat dipergunakan Aset tetap lainnya diperoleh untuk dapat dipergunakan	Sesuai
Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tersebut telah diterima ataupun diserahkan hak kepemilikan aset tersebut atau pada saat penguasaannya berpindah.	Tanah diakui dengan bukti kepemilikan. Bukti kepemilikan berupa sertifikat, bukti hibah, bukti pembelian dan bukti lain yang sah secara hukum. Peralatan, dan mesin diakui ketika telah serahkannya hak kepemilikan aset tersebut atau saat penguasaannya berpindah. Gedung dan bangunan diakui ketika telah serahkannya hak kepemilikan aset tersebut atau saat penguasaannya berpindah berpindah. Jalan, irigasi, dan jaringan diakui ketika telah serahkannya hak kepemilikan aset tersebut atau saat penguasaan aset tersebut berpindah. Aset tetap lainnya, diakui ketika telah serahkannya hak kepemilikan aset tersebut atau saat penguasaan aset tersebut berpindah.	Sesuai

Tabel 3 Perbandingan Pengukuran Aset Tetap Pada Badan Keuangan Kab. Ngawi dengan PSAP

No. 07

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (SAP)	Badan Keuangan Kabupaten Ngawi	Keterangan
Aset tetap diukur pada biaya pendapatan. Ketika suatu aset tidak dapat diukur dengan menggunakan biaya perolehannya, biaya perolehan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.	Tanah diakui sebesar biaya pendapatan aset tersebut. Peralatan serta mesin diukur dengan biaya pendapatan aset tersebut yang ditulis pada perolehan. Gedung serta bangunan diukur menggunakan biaya pendapatan aset tersebut. Jalan, irigasi, serta jaringan diukur sebesar biaya pendapatan pada saat perolehan aset tersebut. Aset tetap lainnya diukur menggunakan biaya pendapatan aset tersebut yang ditulis pada perolehan	Sesuai
Biaya aset terdiri dari label harga, termasuk kewajiban impor, atau biaya pengembangan, serta semua biaya langsung karena membawa sumber daya untuk penggunaan yang diharapkan..	Biaya tersebut meliputi harga beli atau biaya perolehan tanah. Perolehan biaya dari alat-alat dan mesin mendeskripsikan jumlah pengeluaran yg sudah dilakukan buat memperoleh alat-alat dan mesin tadi hingga siap pakai. Biaya gedung serta bangunan mendeskripsikan keseluruhan biaya dikeluarkan untuk memperoleh aset gedung serta bangunan hingga siap pakai Biaya perolehan jalan, irigasi serta jaringan mendeskripsikan keseluruhan biaya dikeluarkan untuk memperoleh irigasi serta jaringan hingga siap pakai Biaya perolehan aset tetap lainnya mendeskripsikan keseluruhan biaya dikeluarkan untuk mendapatkan aset tetap tersebut hingga siap pakai.	Sesuai

Tabel 4 Perbandingan Penilaian Awal Aset Tetap Pada Badan Keuangan Kab. Ngawi dengan Peraturan SAP No. 07

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 (SAP)	Badan Keuangan Kabupaten Ngawi	Keterangan
Barang berwujud yang dapat diakui sebagai aset dan diklasifikasikan sebagai aset berwujud pada awalnya diukur pada biaya perolehan tersebut.	Tanah dinilai sebesar biaya pendapatan, termasuk biaya perolehan tanah, biaya pendapatan hak, biaya pematangan, pengukuran, penyimpanan serta biaya lainnya. Penilaian peralatan serta mesin adalah besar biaya pendapatan yang dicatat disaat perolehan peralatan beserta mesin Gedung serta Bangunan ditulis sebesar biaya pendapatan Jalan, irigasi, serta jaringan ditulis sebesar biaya pendapatan Aaset tetap lainnya ditulis sebesar biaya pendapatan pada saat pencatatan	Sesuai

Tabel 5 Perbandingan Penyusutan Aaset Tetap Pada Badan Keuangan Kab. Ngawi dengan

Peraturan SAP No. 07

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (SAP)	Badan Keuangan Kabupaten Ngawi	Keterangan
Beban penyusutan setiap periode dianggap sebagai pengurangan dari anggaran penyampaian aset tetap, dikurangi dari catatan moneter dan biaya devaluasi dikurangkan dari laporan operasional.	Beban penyusutan setiap periode dianggap sebagai pengurangan dari anggaran penyampaian aset tetap, dikurangi dari catatan moneter dan biaya devaluasi dikurangkan dari laporan operasional	Sesuai

Tabel 6 Perbandingan Penilaian kembali Aset Tetap Pada Badan Keuangan Kab. Ngawi dengan Peraturan SAP No. 07

PP Nomor 71 Tahun 2010 (SAP)	Badan Keuangan Kabupaten Ngawi	Keterangan
Revaluasi atau penilaian kembali aset tetap umumnya tidak diperbolehkan karena menurut standar akuntansi pemerintah, penilaian aset didasarkan pada biaya pendapatan atau harga perubahan. ketentuan ini dapat dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah nasional.	Revaluasi atau penilaian kembali aset tetap umumnya tidak diperbolehkan karena menurut standar akuntansi pemerintah, penilaian aset didasarkan pada biaya pendapatan atau harga perubahan. ketentuan ini dapat dilakukan cocok dengan peraturan pemerintah nasional.	Sesuai

Tabel 7 Perbandingan Pengungkapan Aset Tetap pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi dengan Peraturan SAP No. 07

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (SAP)	Badan Keuangan Kabupaten Ngawi	Keterangan
Laporan anggaran mengungkapkan kriteria pengukuran digunakan dalam penentuan nilai tercatat.	Aset tetap tanah disajikan didalam neraca sesuai biaya perolehan pada saat tanah tersebut diperoleh Peralatan serta mesin disajikan didalam neraca pada golongan aset tetap sebesar nilai wajarnya disaat perolehan. Gedung serta bangunan disajikan didalam neraca pada golongan aset tetap sebesar nilai wajarnya disaat perolehan. Jalan, irigasi, serta jaringan disajikan didalam neraca pada golongan aset tetap sebesar nilai wajarnya disaat perolehan. Aset tetap lainnya disajikan didalam neraca pada golongan aset tetap sebesar nilai wajarnya disaat perolehan.	Sesuai

<p>Setiap jenis aset seperti aaset tetap tanah, gedung serta bangunan, peralatan beserta mesin dan lain sebagainya harus dinyatakan pada laporan anggaran secara terpisah dan terperinci dalam catatan atas laporan anggaran</p>	<p>Aset tanah dinyatakan dalam neraca golongan aset tetap pada saat biaya pendapatan diperoleh Peralatan serta mesin dinyatakan dalam neraca golongan aaset tetap pada saat biaya pendapatan diperoleh Gedung serta bangunan dinyatakan dalam neraca golongan aset tetap pada saat biaya pendapatan diperoleh. Jalan, irigasi, serta jaringan dinyatakan dalam neraca golongan aaset tetap pada saat biaya pendapatan diperoleh Aset tetap lainnya dinyatakan dalam neraca golongan aset tetap pada saat biaya pendapatan diperoleh</p>	<p>Sesuai</p>
<p>Penyesuaian terhadap total yang tercatat di akhir periode untuk mencerminkan penambahan, pelepasan, pengumpulan penyusutan serta perubahan nilai, jika ada aset tetap lainnya.</p>	<p>Penyesuaian nilai tercatat tanah pada awal serta akhir periode yang menunjukkan penambahan, perolehan dan juga pengurangan Penyesuaian jumlah tercatat peralatan serta mesin pada awal dan juga akhir periode yang menunjukkan penambahan, perolehan serta pengurangan Rekonsiliasi nilai tercatat gedung serta bangunan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, perolehan yang berasal dari pembelian dan juga pengurangan. Rekonsiliasi nilai tercatat Jalan, irigasi, dan jaringan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, perolehan yang berasal dari pembelian dan pengurangan. Rekonsiliasi nilai tertulis aaset tetap lainnya pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, perolehan yang berasal dari pembelian dan pengurangan.</p>	<p>Sesuai</p>

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang memperoleh hasil, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi terdiri dari Pengakuan, Penilaian Awal, Penilaian Lanjutan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 serta Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017.
2. Perlakuan Akuntansi aaset tetap pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi sudah sesuai dengan SAP No.07.

UCAPAN TERIMAKASIH

Program kegiatan Praktik Kerja Lapangan dari Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang di Badan Keuangan Kab. Ngawi yang dimulai sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021 dapat berjalan lancar dan terselesaikan dengan lancar. Ucapan terimakasih disampaikan kepada Ibu Indah Kusuma Wardhani, S,PT, M.Si selaku Kepala Badan Keuangan Kab. Ngawi.

DAFTAR PUSTAKA

- BPK.RI. (2010). *Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>
- BPK.RI. (2017). *Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngawi No. 17 Tahun 2017*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44628>
- Manossoh, H., & Lambey, R. (2019). *INDONESIA ACCOUNTING pengelola keuangan dan barang milik daerah Kota*. 74–80.
- Rosmawati, & Ishak, A. (2017). *Analisis Pengakuan, Pengukuran, Penilaian dan Pengungkapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No.07 pada Politeknik Negeri Ujung Pandang*. 2017(07), 80–86.
- Safitri, R. S. I. (2017). *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07. Ilmu Dan Riset Akuntansi, 06(07)*, 1–13. <http://www.albayan.ae>